

Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Yudhi Sjafii*,

Economic Development Study Program of University Muhammadiyah Riau

*e-mail: yudhisjafii1982@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Sekitar tujuh puluh persen penerimaan negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak. Jenis penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh kepada penerimaan pajak. Inflasi memberikan pengaruh yang tidak begitu signifikan kepada penerimaan pajak, sedangkan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Kata Kunci: Pajak, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Negara Republik Indonesia memerlukan pendanaan yang cukup besar. Sumber pendanaan ini akan dikumpulkan dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. APBN merupakan acuan dan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan dalam satu tahun kedepan yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan setiap warga negara Indonesia.

Negara Indonesia memiliki banyak sumber-sumber pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Selain pendapatan negara dari sektor pajak, terdapat juga pendapatan negara dari sektor non pajak seperti penerimaan dari bea dan cukai, royalti tambang, minyak dan gas (migas) dan penerimaan lainnya. Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam unsur-unsur pendapatan negara Republik Indonesia. Hampir 80 persen penerimaan negara Republik Indonesia bersumber dari penerimaan sektor pajak. Total pendapatan negara terkumpul dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan dan pengeluaran negara dikelola oleh Kementerian Keuangan. Kementerian ini bertanggungjawab terhadap pengelolaan negara. Administrasi perpajakan dikelola oleh sebuah instansi pemerintah bernama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Unit kerja DJP tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Unit dari DJP yang menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari

masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak atau KPP.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan di berdiri pada tahun 2008 seiring dengan bergulirlnya sistem modernisasi dan restrukturisasi kantor pelayanan pajak (secara bertahap sejak tahun 2002). KPP Pratama Pekanbaru Tampan terletak di Jl. SM Amin - Arengka 2, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. KPP Pratama Pekanbaru Tampan membawahi 5 kecamatan yang terletak di wilayah Kota Pekanbaru antara lain Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sukajadi.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki dua target utama yang harus dicapai setiap tahunnya, yaitu target kepatuhan pajak dan target penerimaan pajak. Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu (2007) dalam Rahayu (2010)). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance tahun 2004, menyatakan bahwa hasil kepatuhan (compliance outcomes) adalah:

- a. Registration, yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.
- b. Filling, yaitu kepatuhan untuk mengisi laporan pajak.
- c. Reporting, yaitu kepatuhan untuk melaporkan laporan pajak.
- d. Payment, yaitu kepatuhan untuk membayar pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Kedua target ini memiliki keterikatan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan yang merupakan proses bisnis utama atau core business Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mencapai target tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari KPP Pratama Tampan baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan penerimaan pajak diantaranya penagihan pajak, pelayanan pajak, pengawasan dan lain-lain. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya tingkat inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosialisasi dan pengetahuan masyarakat dan lain-lain.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa faktor-faktor eksternal seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Negara mempunyai dasar atas hak untuk memungut pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Beberapa teori menurut Mardiasmo (2011) antara lain: (1) Teori Asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut; (2) Teori Kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan; (3) Teori Daya Pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ada 2 pendekatan yaitu: (a) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. (b) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. (4) Teori Bakti, dasar keadilan pemungutan pajak.

terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban; (5) Teori Asas Daya Beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang wajib diketahui, yaitu : (a) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara; (b) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara; (c) Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung ; (d) berdasarkan Undang-Undang.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) dalam Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai berikut : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Soemitro dalam Mardiasmo (2016) memberikan pengertian sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 11 (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak di pungut berdasarkan Undang Undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Sukirno (2011:165) menyatakan bahwa: "Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus". Menurut Murni (2013:202) menyatakan bahwa: "Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus". M. Natsir (2014:253) menyatakan bahwa: "Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus".

Beberapa pakar ekonomi sudah pernah menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sumber, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait.

Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Budiono (2013), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan periode 2020–2024. Penelitian mencakup seluruh data terkait variabel tersebut, dengan metode pengambilan sampel time series. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji parsial (t-test), simultan (F-test), serta pengukuran koefisien determinasi (Adjusted R^2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dimana pengujian dilaksanakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh dari jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji dan mengetahui apakah pada model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya terdistribusi normal atau tidak. Dimana model regresi yang benar yaitu memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	174.0887319
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.105
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil One Sample Kolmogorof-Smirnof Test menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig sebesar 0.200. Berdasarkan kaidah uji normalitas dengan statistic non parametrik Kolgorof-Smirnof (K-S), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal.
 - Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
- Berdasarkan gambar diatas, nilai signifikasi sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual penelitian ini terdistribusi secara normal. Data ini telah memenuhi uji normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji Multikolinearitas adalah untuk menguji model regresi apakah terdapat hubungan di antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	506.795	71.003		7.138	.000		
	INF	-11.445	47.479	-.051	-.241	.812	.981	1.019
	PE	40.962	17.741	.493	2.309	.034	.981	1.019

a. Dependent Variable: PP

terdapat adanya korelasi di antara variabel bebas.

Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas didasarkan dengan melihat nilai dari VIF (Variance Inflation Factor):

- Apabila nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas.
- Apabila nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan tabel diatas untuk variabel INF dan PE memiliki nilai tolerance sebesar 0.981 dimana nilai tolerance > 0.10 . Untuk variabel INF dan PE memiliki nilai VIF sebesar 1,019 dimana nilai VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji model regresi apakah terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain konsisten/tetap dinamakan Homoskedastisitas dan jika berbeda maka dinamakan Heteroskedastisitas.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	107.850	40.908		2.636	.017		
	INF	-13.156	27.355	-.113	-.481	.637	.981	1.019
	PE	12.466	10.221	.286	1.220	.239	.981	1.019

a. Dependent Variable: ABS_RES

Pengambilan keputusan dalam uji Heteroskedastisitas didasarkan atas:

- Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas.
- Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti terjadi masalah Heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel di atas variabel INF memiliki nilai sig. 0.637, variabel PE memiliki nilai sig. 0.239. Dari hasil output diatas diketahui bahwa nilai sig. dari INF dan PE > 0.05 . Dapat disimpulkan bahwa pengolahan data diatas tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah sebuah model regresi linear terdapat hubungan antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t- 1 sebelumnya. Untuk mengambil keputusan dalam uji

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.149	184.04457	.239	2.668	2	17	.098	1.004

a. Predictors: (Constant), PE, INF

b. Dependent Variable: PP

Autokorelasi bisa dilakukan dengan cara melihat nilai pada prob F atau Chi Square maka terjadi gejala Autokorelasi. Berdasarkan tabel diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,004.

Uji Signifikasi Parsial (Uji T)

Pengaruh secara parsial antara inflasi (INF) terhadap penerimaan pajak (PP) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- H_0 = Pengaruh inflasi (INF) terhadap penerimaan pajak (PP) tidak signifikan
- H_a = Pengaruh inflasi (INF) terhadap penerimaan pajak (PP) signifikan

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	506.795	71.003		7.138	.000		
	INF	-11.445	47.479	-.051	-.241	.812	.981	1.019
	PE	40.962	17.741	.493	2.309	.034	.981	1.019

a. Dependent Variable: PP

Nilai probabilitas sebesar 0.812 lebih besar dari 0,05 ($0,812 > 0,05$) maka inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengaruh secara parsial antara inflasi (PE) terhadap penerimaan pajak (PP) di KPP

Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- a. H_0 = Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap penerimaan pajak (PP) tidak signifikan
- b. H_a = Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap penerimaan pajak (PP) signifikan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	506.795	71.003		7.138	.000		
	INF	-11.445	47.479	-.051	-.241	.812	.981	1.019
	PE	40.962	17.741	.493	2.309	.034	.981	1.019

a. Dependent Variable: PP

Nilai probabilitas sebesar 0.034 lebih kecil dari 0,05 ($0,034 > 0,05$) maka pertumbuhan ekonomi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengaruh secara simultan antara inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap penerimaan pajak (PP) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- a. H_0 = Pengaruh inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap penerimaan pajak (PP) adalah tidak signifikan
- b. H_a = Pengaruh inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap penerimaan pajak (PP) adalah signifikan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180768.155	2	90384.078	2.668	.098 ^b
	Residual	575830.845	17	33872.403		
	Total	756599.000	19			

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), PE, INF

Berdasarkan tabel diatas, probabilitas sebesar 0,098 lebih besar dari 0,05 ($0,098 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PE) secara simultan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk dapat mengetahui berapa besar nilai dari pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka digunakanlah koefisien determinasi. Koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Apabila nilai koefisien determinasi semakin mencapai angka nol maka akan semakin kecil pula pengaruh variabel bebas kepada variabel terikatnya. Apabila nilai koefisien mencapai angka 100% berarti pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Nilai dari koefisien determinasi bisa diperlihatkan pada tabel yang ada di bawah ini:

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.149	184.04457	.239	2.668	2	17	.098	1.004

a. Predictors: (Constant), PE, INF
b. Dependent Variable: PP

Dari output SPSS model summary, besarnya adjust R^2 adalah 0.149; hal ini menunjukkan bahwa 14,9% variasi nilai penerimaan pajak (PP) dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variable independen yaitu inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PE). Sedangkan sisanya ($100\% - 14,9\% = 85,1$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model yang diteliti.

Hasil Model Regresi

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	506.795	71.003		7.138	.000		
	INF	-11.445	47.479	-.051	-.241	.812	.981	1.019
	PE	40.962	17.741	.493	2.309	.034	.981	1.019

a. Dependent Variable: PP

Dari data diatas, maka model persamaan regresinya adalah :

$$Y = 506,795 - 11,445 X_1 + 40,962 X_2 + e$$

Dari persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Jika variabel bebas dianggap konstan, maka besarnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 506,795 satuan
2. Variabel Y tidak terlalu dipengaruhi oleh variabel X_1 dan X_2 .
3. Koefisien regresi untuk INF sebesar -11,445 yang menyatakan bahwa setiap penambahan nilai inflasi (INF) sebesar 1 satuan akan menurunkan penerimaan pajak (PP) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 11,445 satuan.
4. Koefisien regresi untuk PE sebesar 40,962 yang menyatakan bahwa setiap penambahan nilai pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 1 satuan akan menaikkan

penerimaan pajak (PP) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 40,962 satuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan diatas, peneliti telah melakukan penelitian hubungan variabel bebas yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terhadap kinerja penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang merupakan variabel terikat. Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperoleh persamaan regresi atas data variabel yaitu : $Y = 506,795 - 11,445 X_1 + 40,962 X_2 + e$
2. Berdasarkan pengujian terhadap inflasi, maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat inflasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Berdasarkan pengujian terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberi saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, maupun bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk membuat kebijakan kedepan bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap belanja negara yang selanjutnya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Direktorat Jenderal Pajak – KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan diatas, semoga dapat memberikan gambaran dalam membuat strategi dalam pencapaian penerimaan pajak dimulai dari perencanaan target penerimaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi strategi penerimaan pajak setiap tahunnya.

3. Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini kiranya dapat memberikan saran pemikiran kepada pihak yang berwewenang dalam kebijakan perpajakan agar dapat guna dan mencapai apa yang telah di amanahkan undang- undang. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan

yang ini di teliti dan lebih menfokuskan terhadap apa yang di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman Bayu, dan Nugroho SBM. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota semarang. *Jurnal of economic*. Volume 10, Nomor 1, tahun 2021.
- Prasetyo, (2016), Analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (tahun 2011-2014). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Priyatno, Dwi. (2007). Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik). Yogyakarta: Mediakom.
- Putri, Phany Ineke. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. *Journal of economic and policy*, 6 (2) (2013): 103-213
- Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Saputra, Anatoly Aditya. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota cilegon. *Jurnal ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sudirman, Risnawati & Antong Amiruddin. (2015). Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik Indonesia. Malang: Empatdua Media.
- Anugrah, K., Simanjorang, R. C., Hutabarat, A. R., Pakpahan, J. R., & Sipahutar, T. T. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Volume 4. Nomor 2.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2024, Mei 27). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Menurut Pengeluaran, 2020-2024.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). Ekonometrika Teori & Aplikasi. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Hestanto. (t.thn.). Konsep Dasar Perpajakan di Indonesia Menurut Para Cendekiawan. Dipetik Januari 27, 2021, dari hestanto.web.id: <https://www.hestanto.web.id/pajak/>
- Kantor Wilayah DJP Riau. (2024). Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2020- 2024. Riau.
- Krisnawati, E. (2021, Januari 7). Mengenal Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi & Daftar Tokoh Pemikirnya. Dipetik Februari 21, 2021, dari tirto.id: <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-pertumbuhan-ekonomi-daftar-tokoh-pemikirnya>.
- Kuznets, S. (2009). Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Journal* , 335-357.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Mispiyanti, & Kristanti, I. N. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS)* , 219- 233.
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, VOL 2
- Pusphita, P. V., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.22.2., 153.
- Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wijayanti, A. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro.Semarang
- Folster S., Henrekson M. Efek pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan perpajakan di negara-negara kaya. *European Economic Review*. 2001;45(8):1501–1520.
- Agusti, RR, & Rahman, AF (2023). Determinan Sikap Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah: Bukti dari Penelitian.
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). Kerangka konseptual untuk administrasi pajak digital - Tinjauan sistematis *Jurnal Informasi Pemerintah*.
- Cahyadini, A., Hutagalung, JIG, & Muttaqin, Z. (2023). Urgensi reformasi UU perpajakan Indonesia dalam menghadapi digitalisasi ekonomi.
- DJP. (2023a). *Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.

www.pajak.go.id.

Slemrod, J. (2019). Kepatuhan dan penegakan pajak. *Jurnal Literatur Ekonomi*, 57(4), 904–954.

